



Administratio:

Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan

Volume 14 (2) 2023: 155-172

P-ISSN: 2087-0825, E-ISSN: 2548-6977

DOI: 10.23960/administratio.v14i2.400

Accredited by Kemenristek Number 85/M/KP/2020 (Sinta 4)



ARTICLE



Analisis Dampak Governance Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Asean

Muhammad Isbad Addainuri^{1*}, Maulana Abidin², Lestari Etika Suci³

¹²³ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

How to Cite: Addainuri, M.I., Abidin, M., Suci, L.E. (2023) Analisis Dampak Governance Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Asean. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 14(2)

Article History

Received: 16 November 2023

Accepted: 1 Desember 2023

Keywords:

Governance
Economic Growth

ABSTRACT

The goal in economic development is to achieve strong economic growth. There are six indicators to assess good governance, including Voice and Accountability, Political Stability, Government Effectiveness, Regulatory Quality, Rule of Law, and Control of Corruption. This study focuses on the analysis of ten ASEAN countries, including Indonesia, Malaysia, Singapore, the Philippines, Myanmar, Brunei Darussalam, Cambodia, Laos, Thailand and Vietnam, with a research time span of 2017 to 2021 using panel data analysis methods with data processing used. in this research is the Eviews version 10 application. The sampling technique uses purposive sampling. This research indicates that the variables Voice and Accountability, Political Stability, Regulatory Quality, and Control of Corruption do not have a significant impact on economic growth. This shows that public participation in the election of parties and leaders, association, freedom of opinion and expression, and freedom in determining public policy will not affect economic growth in the country. Political stability and economic growth are two different aspects, and progress in achieving one aspect does not always have an impact on progress in achieving the other aspect. Apart from that, no matter how good the government's ability to provide regulations, implement policies, public regulations and effectiveness in development does not affect the increase in economic growth. Corruption has a role as a financial incentive that encourages entrepreneurs to avoid delays, thereby making transaction processes more efficient compared to involving the public sector. Corruption in the form of "speed money" has the potential to have an impact on economic growth. On the other hand, the Government Effectiveness and Rule of Law variables have an influence on economic growth in ASEAN countries. Government Effectiveness is characterized by increasing levels of compliance and law enforcement in complying with regulations which contribute to increasing economic growth. The rule of law functions to limit government authority, prevent corruption in government so that it can contribute significantly to economic progress and spur overall economic growth. The government is expected to be able to improve the quality of its performance and comply with applicable legal regulations so that it can carry out its duties and functions effectively, and be responsible for its authority in order to improve good governance, so that economic growth in the country is better and continues to increase. Economic actors and all levels of society should be able to increase awareness of the level of compliance and law enforcement in complying with regulations in order to create good governance and increase economic growth.

* Corresponding Author

Email : itsbadayenk25@gmail.com

Kata Kunci:

Tata Kelola Pemerintah
Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRAK

Tujuan dalam pembangunan ekonomi adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat. Terdapat enam indikator untuk menilai Tata Pemerintahan yang Baik diantaranya dengan *Voice and Accountability*, *Political Stability*, *Government Effectiveness*, *Regulatory Quality*, *Rule Of Law*, dan *Control Of Corruption*. Kajian ini berpusat pada analisis sepuluh negara ASEAN, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam, dengan rentang waktu penelitian tahun 2017 hingga 2021 menggunakan metode analisis data panel dengan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah aplikasi Eviews versi 10. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Penelitian ini mengindikasikan variabel *Voice and Accountability*, *Political Stability*, *Regulatory Quality*, dan *Control of Corruption* tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan partai dan pemimpin, berserikat, kebebasan berpendapat, dan berekspresi, dan kebebasan dalam menentukan *public policy* tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. *Political Stability* dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua aspek yang berbeda, dan kemajuan dalam mencapai salah satu aspek tidak selalu berdampak pada kemajuan pencapaian aspek yang lain. Selain itu, sebaik apapun kemampuan pemerintah dalam memberikan regulasi, implementasi kebijakan, *public regulations* (peraturan publik), serta efektifitas dalam perkembangan tidak mempengaruhi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Korupsi memiliki peran sebagai dorongan finansial yang mendorong pengusaha menghindari keterlambatan, sehingga membuat proses transaksi lebih efisien dibandingkan dengan melibatkan sektor publik. Korupsi yang bersifat "*speed money*" berpotensi memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, variabel *Government Effectiveness* dan *Rule of Law* memiliki pengaruh pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN. *Government Effectiveness* ditandai dengan meningkatnya tingkat kepatuhan dan penegakan hukum dalam mematuhi peraturan yang berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. *Rule of Law* berfungsi membatasi wewenang pemerintah, mencegah terjadinya korupsi dalam pemerintahan sehingga dapat berkontribusi secara signifikan pada kemajuan ekonomi dan memacu pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dan menaati aturan hukum yang berlaku agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, serta bertanggung jawab terhadap kewenangannya agar dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga pertumbuhan ekonomi di negara nya semakin baik dan terus meningkat. Para pelaku ekonomi maupun seluruh lapisan masyarakat hendaknya dapat meningkatkan kesadaran akan tingkat kepatuhan dan penegakan hukum dalam mematuhi peraturan agar dapat menciptakan *good governance* dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dimana pencapaian pembangunan perekonomian suatu negara tertentu ditunjukkan oleh tingginya perekonomiannya. Pengukuran pertumbuhan ekonomi sering kali dilakukan dengan menggunakan PDB (Produk Domestik Bruto) sebagai salah satu metode umum yang digunakan sebagai indikatornya. PDB merupakan hasil akhir dari semua produksi yang tercapai dalam periode tertentu, umumnya selama satu tahun oleh suatu negara. Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dengan yang namanya liberalisasi ekonomi dan globalisasi modern yang dapat mempercepat perkembangan sistem ekonomi ke arah yang lebih luas antar negara dan proses koalisi ekonomi di berbagai kawasan dunia (Putri, 2022).

Globalisasi ekonomi adalah suatu proses di mana aktivitas ekonomi dan perdagangan melibatkan negara-negara di seluruh dunia, menjadikan mereka sebagai kekuatan pasar tunggal yang semakin terhubung tanpa terbatas oleh hambatan atau batasan wilayah negara. Perekonomian yang terglobalisasi ini mengimplikasikan perlunya menghilangkan semua batasan dan hambatan terhadap pergerakan barang, jasa, dan modal.

Globalisasi ekonomi juga mencakup liberalisasi perdagangan dan investasi, memfasilitasi aliran barang, jasa, dan modal yang lebih leluasa di antara negara-negara yang terlibat. Dampak dari globalisasi ekonomi sangat bervariasi, termasuk peningkatan perdagangan internasional, pembukaan peluang pekerjaan baru, dan munculnya disparitas ekonomi antara negara-negara maju dan berkembang. Selain itu, globalisasi ekonomi dapat berpengaruh pada kebijakan ekonomi suatu negara, terutama dalam hal regulasi perdagangan dan investasi (Pustikom Universitas Bung Hatta, 2018). Hampir semua negara berkembang telah mengubah kebijakan ekonomi mereka dengan meningkatkan tingkat liberalisasi menuju peningkatan penggunaan mekanisme pasar melalui berbagai reformasi ekonomi yang berorientasi pasar (Zaroni, 2015).

Liberalisasi perdagangan atau perdagangan bebas adalah suatu keadaan di mana suatu negara terlibat dalam kegiatan perdagangan lintas negara tanpa menghadapi hambatan apa pun. Proses mencapai kondisi perdagangan bebas ini dikenal sebagai liberalisasi perdagangan. Bersamaan dengan perkembangannya, timbul perdebatan yang melibatkan pendapat pro dan kontra terkait liberalisasi perdagangan. Negara-negara yang mendukung liberalisasi perdagangan meyakini bahwa langkah ini akan meningkatkan efisiensi ekonomi, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan perekonomian. Sebaliknya, negara-negara yang menolak liberalisasi perdagangan berpendapat bahwa penerapan kebijakan tersebut dapat merugikan negara, meskipun pada kondisi tertentu juga dapat memberikan keuntungan (Budiyanti, 2017).

Nowbutsing (2014) melakukan analisis mengenai dampak keterbukaan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di 15 negara anggota *Indian Ocean Rim* (IOR) selama periode tahun 1997-2011. Penelitian ini menggunakan variabel independen, termasuk pengeluaran pemerintah, pembentukan modal bruto, tingkat inflasi, tenaga kerja, dan keterbukaan ekonomi. Keterbukaan ekonomi diukur melalui indikator rasio ekspor terhadap PDB, rasio impor terhadap PDB, dan rasio ekspor dan impor terhadap PDB. Hasil penelitian menunjukkan hubungan positif antara keterbukaan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, keterbukaan yang diukur melalui rasio impor terhadap PDB memiliki pengaruh yang paling signifikan pada pertumbuhan ekonomi.

Meskipun tingginya Produk Domestik Bruto (PDB) tidak secara mutlak mencerminkan bahwa semua masyarakat akan merasakan kesejahteraan, namun PDB yang tinggi dapat meningkatkan kemungkinan mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Karena itu, perbandingan pertumbuhan ekonomi antar negara seringkali dilakukan dengan memeriksa PDB. PDB yang tinggi mencerminkan kemampuan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya (N. Gregory Mankiw, 2010). Tata kelola pemerintah yang baik (*Good*

Governance) dapat mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan desentralisasi fiskal. Oleh karena itu, lingkungan dengan tata kelola yang baik akan menyebabkan dana alokasi umum dapat berkontribusi positif bagi Produk Domestik Bruto (Mukiwihando, 2020). Tata kelola pemerintah yang baik akan meningkatkan produktifitas sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik lagi dalam jangka panjang (M. G. Wibowo, 2020).

World Bank, UNDP, dan *Asian Development Bank* (ADB) merupakan pelopor dalam mengenalkan Konsep *Good Governance* yang kemudian menjadi landasan bagi para ahli di berbagai negara untuk mengembangkan konsep-konsep tentang *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas). *World Bank* menjelaskan bahwa baik buruknya pengelolaan penyelenggaraan negara dapat dinilai dari pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan negara dan pengembangan kerangka kerja dalam pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pasar (Mira & Hammadache, 2017a).

Menurut Kaufmann *et al.* (2009), Kualitas pemerintahan bisa dinilai berdasarkan 6 indikator, yakni *Voice and Accountability*, *Political Stability*, *Government Effectiveness*, *Regulatory Quality*, *Rule Of Law*, dan *Control Of Corruption*. Negara melalui pemerintahannya, perlu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan konsep *Good Governance* untuk mengurangi risiko tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh *government effectiveness*. Keenam variabel tata kelola tersebut memiliki korelasi dengan efisiensi pasar dan pertumbuhan ekonomi. Kajian inilah yang menjadi inspirasi bagi Penelitian berikutnya dengan menggunakan metode regresi untuk mengeksplorasi lebih lanjut (Kaufmann *et al.*, 2009).

Penelitian empiris mengenai pengaruh tata kelola pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah ASEAN telah dilaksanakan oleh beberapa peneliti, termasuk di antaranya adalah Bayar (2016) menunjukkan semua indikator tata kelola kecuali *regulatory quality* mempunyai dampak positif yang signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini juga menunjukkan bahwa *control of corruption* dan *rule of law* mempunyai dampak terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan *political stability* mempunyai dampak paling kecil.

Asbarini *et al.* (2021) juga meneliti dan menemukan bahwa variabel *Governance Effectiveness*, *Political Stability*, *Regulatory Quality* dan *Rule of Law* berpengaruh positif signifikan pada Pertumbuhan Ekonomi. Di sisi lain, variabel *Control of Corruption* dan *Voice and Accountability* tidak memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kawasan ASEAN. Menurut Mukiwihando (2020) dalam penelitian nya menunjukkan bahwa tata kelola memiliki dampak penting dalam mencapai sasaran desentralisasi fiskal. Hasil lain dari penelitian juga memverifikasi bahwa tingkat pendidikan hanya berpengaruh secara signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di wilayah yang memiliki tata kelola yang baik.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mira & Hammadache (2017b), dalam studi ini peneliti menemukan bahwa *good governance* tidak memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan tata kelola yang baik hanya menjadi relevan jika suatu negara mencapai tingkat pembangunan ekonomi dan sosial yang memadai. Pembangunan tersebut memungkinkan lembaga pemerintahan yang baik untuk meningkatkan pertumbuhan.

Jika dilihat dari perspektif setiap variabel tata kelola yang baik, hasilnya juga beragam di antara peneliti. Estimasi hasil menggunakan regresi data panel pada enam variabel *good governance* terhadap pertumbuhan ekonomi akan bergantung pada faktor-faktor seperti periode penelitian, jumlah sampel, objek penelitian dll. Oleh karena itu, studi ini berfokus meneliti *good governance* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang tergabung dalam Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara yang disebut ASEAN.

ASEAN bertujuan sebagai wadah untuk menciptakan kerjasama dalam hal pertumbuhan ekonomi, perdamaian, dan stabilitas serta perkembangan sosial budaya di negara yang tergabung dalam ASEAN (Asbarini et al., 2021). Upaya untuk majukan pertumbuhan, meningkatkan taraf hidup, menurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup penduduk turut serta dilakukan oleh beberapa negara yang menjadi bagian dari ASEAN. Pada umumnya, hampir semua negara di Asia Tenggara ikut merasakan dampak krisis 2008. Namun, tidak butuh waktu lama bagi negara-negara untuk pulih dari krisis global tersebut (E. Wibowo, 2013).

Anggota ASEAN memiliki berbagai perjanjian, termasuk kesepakatan ekonomi yang saat ini lebih dikenal sebagai MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) tujuan dari kesepakatan ekonomi tersebut adalah untuk kesejahteraan semua masyarakat dari negara yang menjadi anggota ASEAN yang dianggap sudah cukup siap dalam hal pertumbuhan perekonomian dengan usia yang sudah lebih dari 50 tahun ini (1967-2022) (Syaifullah & Malik, 2017). Kenyataannya, pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN masih tidak stabil. Hal ini tidak sesuai dengan visi awal pembentukan ASEAN yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara anggotanya (Sari & Kaluge, 2017).

Hal ini mendorong peneliti untuk mengkaji apakah pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN dapat dipengaruhi oleh *Government* (tata kelola pemerintah) seperti penelitian yang dilakukan oleh Alam et al., (2017) mengindikasikan bahwa efektivitas pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan. Karena tata kelola pemerintah yang baik sebagai tujuan pembangunan Milenium (MDGs). Terlebih lagi, tata kelola pemerintah merupakan faktor penentu besar dalam alokasi bantuan luar negeri dari banyak bank pembangunan multilateral seperti *World Bank* dan *Asian Development bank*.

Penelitian ini bertujuan untuk meriset mengenai analisis dampak *Governance* pada pertumbuhan ekonomi di negara yang tergabung dalam ASEAN sebagai suatu wadah kerja sama antarnegara di kawasan Asia Tenggara. Pembentukan ASEAN bertujuan untuk mendorong kolaborasi dalam pertumbuhan ekonomi, mempromosikan perdamaian, stabilitas serta pembangunan sosial dan budaya di negara yang tergabung dalam ASEAN (Asbarini et al., 2021). Berdasarkan konteks tersebut, tampaknya sangat krusial pengaruh dari Tata Kelola yang efektif terhadap perkembangan ekonomi. Oleh karena landasan tersebut, peneliti memilih topik penelitian berjudul “Analisis Dampak *Governance* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi” dengan periode waktu tahun 2017 hingga 2021 pada 10 negara yang tergabung di ASEAN.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro & Smith (2006) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses meningkatkan produksi satu periode ke periode berikutnya yang berperan sebagai indikator pencapaian pembangunan negara. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan aktivitas ekonomi untuk menciptakan pendapatan tambahan bagi warga selama jangka waktu tertentu. Tingginya pertumbuhan ekonomi didorong oleh pelaksanaan efektifitas pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk yang memiliki pendapatan tinggi maupun rendah (Annur, 2019).

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan jumlah pengeluaran (output) perekonomian suatu negara. Jika pengeluaran suatu negara lebih besar daripada populasi, maka pengeluaran (output) per kapita akan semakin meningkat dan kualitas hidup juga ikut meningkat. Efek dari pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produksi perkapita, maka masyarakat di pedesaan dan masyarakat agraris menjadi masyarakat industri yang modern

(Case & Fair, 2002). Sukirno (2015) berpendapat bahwa dalam pertumbuhan ekonomi terdapat 4 teori yaitu:

1. Teori Pertumbuhan Klasik

Pakar ekonom klasik berpendapat bahwa terdapat empat elemen yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yakni jumlah penduduk, investasi dalam modal barang, lahan dan sumber daya alam yang tersedia, serta tingkat teknologi yang diterapkan. Menyadari bahwa banyak faktor yang penting terhadap pertumbuhan ekonomi, maka para pakar ekonomi klasik memusatkan perhatian terhadap dampak populasi penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan jumlah penduduk akan memperluas pasar, dan perluasan pasar ini akan mendorong tingkat spesialisasi. Adanya spesialisasi akan meningkatkan tingkat aktivitas ekonomi atau mempercepat proses pembangunan ekonomi karena spesialisasi dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong kemajuan teknologi. Oleh karena itu, menurut teori klasik, pertumbuhan ekonomi dipicu oleh hubungan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi (Suryana, 2000).

2. Teori Schumpeter

Teori ini mengungkapkan betapa esensialnya kewirausahaan dalam pertumbuhan ekonomi. Teori ini mengindikasikan bahwa pengusaha merupakan kelompok yang terus melakukan inovasi atau perbaikan kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut diantaranya:

- a. Mengenalkan sesuatu yang baru.
- b. Peningkatan efisien produksi dalam menghasilkan sesuatu barang,
- c. Perluasan penjualan barang atau produktifitas yang baru,
- d. Pengembangan bahan baku yang baru dan melakukan efisiensi perusahaan dengan beberapa inovasi dalam organisasi.

Salah satu pandangan penting dari Schumpeter adalah dasar teori pembangunannya yang meyakini bahwa sistem kapitalisme merupakan sistem terbaik untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Meskipun demikian, Schumpeter dengan sikap pesimisnya meramalkan bahwa dalam jangka panjang, sistem kapitalisme akan mengalami kemunduran. Bagi Schumpeter, dalam proses perkembangan ekonomi, faktor utama yang mendorongnya adalah inovasi, dan para pelakunya disebut sebagai inovator atau wirausaha (entrepreneur). Menurutnya, kemajuan ekonomi dalam suatu masyarakat hanya dapat terwujud melalui inovasi yang dilakukan oleh para wirausaha. Dalam konteks pembangunan ekonomi, Schumpeter membedakan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Bagi Schumpeter, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi masyarakat yang disebabkan oleh peningkatan jumlah faktor produksi yang digunakan, tanpa adanya perubahan pada "teknologi" produksi itu sendiri (Astutiningsih & Sari, 2017).

3. Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar berusaha menguraikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh perekonomian agar dapat tercapai tujuan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang. Harrod-Domar menganalisa menggunakan disagregasi berikut: peralatan produksi telah mencapai kapasitas penuh, tabungan yang sebanding digunakan berdasarkan pendapatan nasional, rasio intensitas modal tetap dalam nilai, dan dua sektor ekonomi.

Dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi, tujuan teori Harrod Domar adalah menjelaskan kondisi yang harus dipenuhi agar suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang stabil atau steady state dalam jangka panjang. Analisis Harrod dan Domar melengkapi analisis Keynesian; yang mana analisis Keynesian lebih fokus pada masalah ekonomi dalam jangka pendek, sementara analisis Harrod Domar

menitikberatkan pada aspek ekonomi dalam jangka panjang. Sebagai perluasan dari teori Keynes, teori Harrod dan Domar menitikberatkan pada aspek permintaan dalam memahami pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya terjadi jika pengeluaran agregat, terutama melalui peningkatan investasi, terus meningkat sesuai dengan tingkat pertumbuhan yang telah ditentukan (Maharani & Isnowati, 2014).

4. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Teori Keynes dan teori Harrod-Domar membahas masalah pertumbuhan perspektif permintaan. Sedangkan menurut teori pertumbuhan Neo-Klasik yang dikembangkan oleh orang-orang Abrahamovis dan Solow mengamati hal ini dari perspektif yang berbeda, yakni dari sudut pandang produksi. Pertumbuhan ekonomi bergantung pada perkembangan elemen-elemen produksi.

Teori pertumbuhan ekonomi ini mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada peningkatan faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan kemajuan teknologi. Menurut teori neo-klasik, faktor produksi yang paling mempengaruhi pertumbuhan output adalah jumlah tenaga kerja dan modal. Namun, model ini memiliki kekurangan karena tidak dapat menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi di banyak negara lebih tinggi dari perkiraan dalam model ini. Salah satu kelemahannya adalah fokus pada peningkatan jumlah faktor produksi tanpa memasukkan faktor-faktor lain yang juga penting, terutama peran teknologi. Dalam model neo-klasik, teknologi dianggap sebagai konstan dan tidak dimasukkan dalam perhitungan, sehingga tidak dapat menjelaskan variasi sebenarnya dalam pertumbuhan ekonomi (Tambunan, 2001).

Tata Kelola Pemerintah

Menurut World Bank (1992), *Good governance* adalah realisasi dari tata kelola pemerintahan yang tepat dan mempunyai kewajiban untuk menjalankan prinsip demokrasi dan efisiensi pasar, menghindari kesalahan distribusi dari dana investasi, serta mencegah terjadinya *political corruption and administration*, serta menjaga disiplin anggaran dan menciptakan *legal and political framework* (kerangka hukum dan kebijakan) untuk pertumbuhan bisnis.

Good governance adalah manifestasi dari pemerintahan yang efektif dan transparan. Pemerintahan yang efektif melibatkan pengelolaan sumber daya sosial, politik, budaya, dan ekonomi dengan berlandaskan kepercayaan serta mandat rakyat. Sebaliknya, tata kelola pemerintahan yang steril adalah konsekuensi dari pengelolaan pemerintah yang efisien, transparan, integritas tinggi, dan bertanggung jawab (Wiliyanti et al., 2014).

Kaufmann et al., (2009), mengemukakan bahwa *Global Governance Indicators* dari World Bank mengevaluasi tingkat efektivitas tata kelola pemerintahan melalui enam indikator, yaitu:

1. *Voice and Accountability*, bertujuan untuk menilai tingkat partisipasi warga negara dalam pemilihan pemerintah, kebebasan berekspresi, hak berserikat, dan kemerdekaan media di suatu negara.
2. *Political Stability*, adalah penilaian terhadap kemungkinan instabilitas pemerintahan atau penggulingan yang melibatkan tindakan inkonstitusional atau kekerasan, seperti konflik rumah tangga dan tindakan terorisme.
3. *Government Effectiveness*, mengevaluasi mutu pelayanan publik, termasuk kemampuan layanan sipil untuk beroperasi tanpa tekanan politik, mutu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, serta keyakinan pada keseriusan pemerintah terhadap kebijakan tersebut.

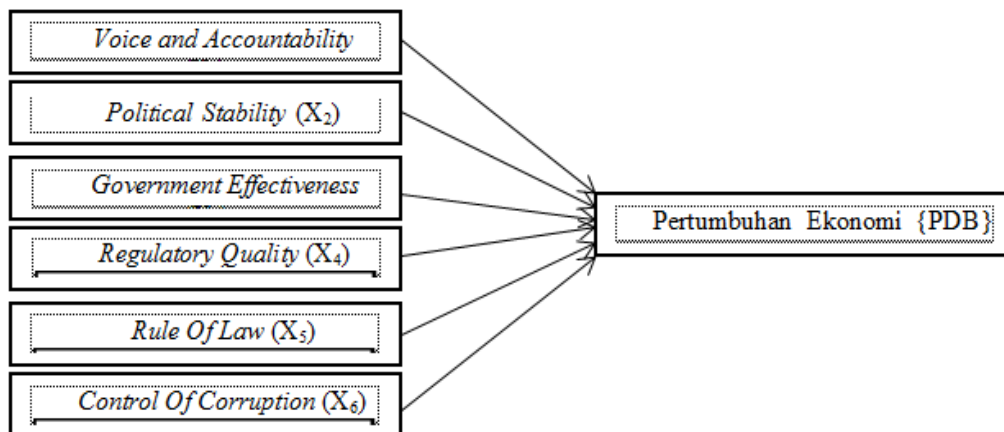
4. *Regulatory Quality*, mengevaluasi kapasitas pemerintahan dalam merancang dan melaksanakan aturan dan regulasi yang mendukung serta mendorong perkembangan sektor swasta yang sehat.
5. *Rule of Law*, menilai efektifitas lembaga-lembaga dan menerapkan nilai-nilai kemasyarakatan, dengan fokus khusus pada kualitas pelaksanaan kontrak, sistem kepolisian, sistem peradilan, dan risiko kejahatan serta diskriminasi.
6. *Control of Corruption*, mengevaluasi kekuasaan yang disalahgunakan demi kepentingan personal, termasuk tindakan korupsi dalam berbagai skala.

Wibowo (2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kualitas *governance* (tata kelola pemerintah) memiliki dampak positif yang cukup besar terhadap perkembangan ekonomi di beberapa negara yang tergabung dalam OKI (Organisasi Kerjasama Islam). Penelitian ini mengungkapkan peran manajemen mutu dari tata kelola pemerintah dalam perekonomian menurut teori pertumbuhan ekonomi terbaru. Indikator kinerja pemerintah dan kualitas lembaga pemerintahan di Indonesia memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Strategi yang dibutuhkan pemerintah untuk dilakukan dalam meningkatkan kinerja pemerintah dan kualitas kelembagaan adalah evaluasi dan pemantauan (Asbarini et al., 2021). Ramadhan (2019) juga menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa kinerja pemerintah dan kualitas kelembagaan memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Strategi yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja pemerintah dan kualitas kelembagaan melalui evaluasi dan pemantauan.

Dalam menjelaskan indikator dari tata kelola pemerintah, Widianatasari & Purwanti (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa variabel *Voice and Accountability*, *Regulatory Quality*, dan *political Stability and Absence of Violence / Terrorism* berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika *Voice and Accountability* memiliki efek merugikan pada pertumbuhan ekonomi, maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan sebenarnya berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, *Regulatory Quality*, dan *Political Stability and Absence Of Violence/ Terrorism* berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa ketika stabilitas dan aturan politik diterapkan dengan baik. Dengan demikian, itu dapat merangsang perkembangan ekonomi.

Widianatasari & Purwanti (2021), Aminu et al. (2021) menemukan bahwa semua koefisien variabel *Voice and Accountability*, *Regulatory Quality*, *Political Stability*, *Rule of Law*, dan *Control of Corruption* berpengaruh signifikan secara statistik kecuali *Government Effectiveness*. Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif antara *Government* yang efektif dengan pertumbuhan ekonomi di daerah. Sesuai dengan hasil studi yang telah dilaksanakan oleh Annur (2019) ditemukan bahwa variabel *voice and accountability*, *government effectiveness*, dan *political stability and absence of violence* berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi di lima negara ASEAN.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah *Good governance* berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN serta memberikan dasar untuk refleksi mengenai “Analisis Dampak *Good Governance* terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara ASEAN” yang digambarkan pada kerangka penelitian dibawah ini:



Gambar 1. Kerangka penelitian

C. METODE

Studi ini memanfaatkan pendekatan kuantitatif dengan menerapkan metode analisis data panel selama periode lima tahun. Data penelitian ini diperoleh dari berbagai situs web resmi yang menyajikan laporan dari variabel terkait dari masing-masing negara, seperti *World Bank*. Populasi penelitian ini mencakup semua negara yang tergabung dalam ASEAN dari awal hingga saat ini. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Negara yang tergabung dalam ASEAN.
- 2) Data terkait *Voice and Accountability*, *Regulatory Quality*, *Political Stability*, *Rule of Law*, dan *Control of Corruption* berpengaruh signifikan secara statistik kecuali *Government Effectiveness*..
- 3) Data penelitian tersedia dan telah dipublikasikan oleh lembaga resmi dalam periode yang ditentukan.

Sehingga penelitian ini berfokus pada 10 negara ASEAN diantaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, serta Thailand mulai dari 2017 hingga 2021.

Berikut adalah bentuk model matriks yang diterapkan dalam penelitian ini:

$$Y = \beta_{0i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \beta_6 X_{6it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Y = Pertumbuhan Ekonomi

X₁ = *Voice and Accountability*

X₂ = *Political Stability*

X₃ = *Government Effectiveness*

X₄ = *Regulatory Quality*

X₅ = *Rule of Law*

X₆ = *Control of Corruption*

ε = error

β = Konstanta

Analisis data panel mengaplikasikan tiga pendekatan model, yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*.

1. *Common Effect* atau *Panel Least Square*. Penerapan Metode dalam model ini relatif sederhana, yaitu penggabungan data *cross section* dan *time series* melalui teknik OLS (*Ordinary Least Square*).
2. *Fixed Effect* merupakan metode regresi yang mempertimbangkan koefisien regresi (slope) tetap konsisten antar wilayah dan selama rentang waktu tertentu, namun terdapat variasi intersep antar wilayah yang tetap konstan sepanjang waktu.
3. *Random Effect Model*. *Random Effect* memiliki 2 (dua) komponen error yang berkontribusi, maka diperlukan adanya penguraian menjadi error gabungan dan error periode waktu.

Pemilihan model terbaik diantara ketiga diatas menggunakan Uji Chow, Uji hausman, serta Uji Langrange Multiple.

1. Uji Chow

Uji Chow digunakan sebagai penentuan model yang sesuai, apakah itu model *Common Effect* atau model *Fixed Effect*. Hipotesis yang diajukan dalam uji Chow adalah:

H₀: *Common Effect Model*

H₁: *Fixed Effect Model*

Apabila nilai Prob < 5% maka H₁ diterima atau *Fixed Effect Model* dan juga sebaliknya apabila nilai Prob > 5% maka H₀ diterima atau *Common Effect Model*.

2. Uji Hausman

Uji Hausman dilaksanakan dalam menentukan pilihan terbaik antara *Random Effect Model* dan *Fixed Effect Model*, dengan mengajukan hipotesis berikut:

H₀: *Random Effect Model*

H₁: *Fixed Effect Model*

Ketika probabilitas (untuk *cross-section* random) memiliki nilai di atas 5%, maka artinya menerima H₀ dan menolak H₁, maka digunakanlah *Random Effect Model*. Sebaliknya, jika Prob nya di bawah 5%, maka artinya menolak H₀ dan menerima H₁, sehingga dipilih lah *Fixed Effect Model*.

3. Uji Langrange Multiple (LM)

Uji Langrange Multiple (LM) digunakan untuk menentukan model terbaik antara *Common Effect Model* atau *Random Effect Model*, dengan mengajukan hipotesis berikut:

H₀: *Random Effect Model*

H₁: *Common Effect Model*

Nilai LM yang dihitung akan dihitung perbandingannya dengan nilai Chi-Square tabel yang memiliki derajat kebebasan sama dengan banyaknya variabel bebas (independen) dan

nilai signifikansinya 5% yang telah ditetapkan. Ketika nilai LM yang dihitung lebih besar daripada nilai *Chi-Square* tabel, maka yang terpilih yaitu *Random Effect Model*. Sebaliknya, ketika nilai LM yang dihitung lebih kecil daripada nilai *Chi-Square* tabel, maka yang terpilih adalah *Common Effect Model*.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Table 1. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1194.866631	(9,34)	0.0000
Cross-section Chi-square	287.990530	9	0.0000

Sumber : Eviews, 2022

Hasil pada pengujian yang sudah dilakukan dengan menggunakan uji chow di atas didapatkan Probabilitas yang ditunjukkan pada kolom *Chi-Square* yakni $0.0000 < \alpha 5\%$. Oleh karena itu, ini mengindikasikan penolakan H_0 dan H_1 diterima. Maka *Fixed Effect Model* lebih cocok dibandingkan dengan *Common Effect Model*.

Table 2. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.555761	6	0.3639

Sumber : Eviews, 2022

Pada pengujian hausman yang telah dilakukan, didapatkan nilai *cross section random* adalah $0.3639 > \alpha (0,05) (0.3639 > 5\%)$. Kesimpulannya, H_1 diterima sementara H_0 ditolak, mengindikasikan *Random Effect Model* adalah model yang sesuai.

Tabel 3. Hasil Uji Langrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects			
Null hypotheses: No effects			
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives			
	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	65.59144 (0.0000)	1.929228 (0.1648)	67.52067 (0.0000)

Sumber : Eviews, 2022

Hasil pengujian yang sudah dilakukan di atas didapatkan nilai Breusch-Pagan sebesar $0.0000 < \alpha 5\%$, maka *Random Effect Model* yang terpilih. Hasil pengujian dengan Chow Test, Hausman Test, dan Langrange Multiplier Test mengarah pada pemilihan *Random Effect Model*.

Tabel 4. Hasil *Random Effect Model*

Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 12/28/22 Time: 19:13				
Sample: 2017 2021				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 10				
Total panel (balanced) observations: 50				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.175757	0.140719	29.67448	0.0000
Voice and Accountability	0.013715	0.025263	0.542897	0.5900
Political Stability	-0.002495	0.006108	-0.408527	0.6849
Government Effectiveness	0.026439	0.008369	3.159246	0.0029
Regulatory Quality	0.003816	0.005942	0.642228	0.5241
Rule of Law	0.024975	0.010352	2.412642	0.0202
Control of Corruption	-0.002316	0.008704	-0.266105	0.7914
Effects Specification			S.D.	Rho
Cross-section random			0.444739	0.9967
Idiosyncratic random			0.025770	0.0033
Weighted Statistics				
R-squared	0.275537	Mean dependent var	0.108185	
Adjusted R-squared	0.174449	S.D. dependent var	0.028545	
S.E. of regression	0.025936	Sum squared resid	0.028925	
F-statistic	2.725716	Durbin-Watson stat	1.396210	
Prob(F-statistic)	0.024732			
Unweighted Statistics				
R-squared	-0.011228	Mean dependent var	4.176252	
Sum squared resid	9.473461	Durbin-Watson stat	0.004263	

Sumber : Eviews, 2022

Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Berdasarkan data diatas, dapatkan nilai f hitung sebesar 2.725716, nilai probabilitasnya 0.000000 dengan tingkat signifikansinya yakni α : 5% maka koefisien F-statistik pada uji tersebut adalah signifikan karena $0.024732 < \alpha$ 5%. Dapat disimpulkan bahwa variabel *Voice and Accountability*, *Political Stability*, *Government Effectiveness*, *Regulatory Quality*, *Rule of Law*, dan *Control of Corruption* secara signifikan memiliki dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Tabel 5. Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.175757	0.140719	29.67448	0.0000
<i>Voice and Accountability</i>	0.013715	0.025263	0.542897	0.5900
<i>Political Stability</i>	-0.002495	0.006108	-0.408527	0.6849
<i>Government Effectiveness</i>	0.026439	0.008369	3.159246	0.0029
<i>Regulatory Quality</i>	0.003816	0.005942	0.642228	0.5241
<i>Rule of Law</i>	0.024975	0.010352	2.412642	0.0202
<i>Control of Corruption</i>	-0.002316	0.008704	-0.266105	0.7914

Sumber : Eviews, 2022

Uji-t untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Nilai t-tabel sebesar 1,98. Pengujian t memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen *Voice and Accountability*, *Political Stability*, *Government Effectiveness*, *Regulatory Quality*, *Rule of Law*, dan *Control of Corruption* terhadap variabel dependen Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka akan dilakukan pembahasan hasil dan implikasi hasil dari penelitian tersebut. Pembahasan dilakukan untuk melihat sejauh mana pengaruh kualitas pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN sebagai pembuktian terhadap hipotesis yang telah disusun sebelumnya. Teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah dijabarkan pada bab tinjauan pustaka akan dijadikan bahan perbandingan apakah teori atau penelitian terdahulu tersebut mendukung ataupun bertentangan dengan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini.

Pembahasan Hasil Penelitian

Merujuk kepada temuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, langkah selanjutnya adalah membahas hasil dan implikasi dari penelitian tersebut. Pembahasan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana dampak kualitas pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah ASEAN. Teori dan temuan penelitian sebelumnya yang telah diuraikan dalam bagian literatur akan dijadikan sebagai dasar perbandingan untuk menilai apakah teori atau penelitian terdahulu tersebut mendukung atau berlawanan dengan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini.

Voice and Accountability

Voice and Accountability dengan nilai koefisien 0.013715 dan tingkat signifikansi 0.5900. Dalam artian, Prob variabel *Voice and Accountability* lebih besar dari α 0,05. Maka kesimpulannya meskipun terdapat pengaruh positif dari *Voice and Accountability* terhadap pertumbuhan ekonomi, namun pengaruh tersebut tidak signifikan. Sejalan dengan penelitian Samarasinghe (2018) mengungkapkan Variabel suara dan akuntabilitas erat kaitannya dengan struktur politik negara. Dalam perbandingan dengan sistem otoriter, partisipasi masyarakat dalam pemerintahan lebih aktif dalam sistem demokrasi. Peningkatan tingkat demokrasi berkontribusi pada peningkatan suara dan akuntabilitas yang memungkinkan munculnya berbagai partai politik. Dengan adanya banyak partai politik, pelaksanaan reformasi ekonomi menjadi lebih kompleks.

E. Wibowo (2013) menemukan bahwa *Voice and Accountability* tidak mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan partai dan pemimpin, berserikat, kebebasan berpendapat, dan berekspresi, dan kebebasan dalam menentukan *public policy* tidak akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.

Political Stability

Political Stability memiliki nilai -0.002495 dengan tingkat signifikansi 0.6849, menunjukkan bahwa pengaruh negatif dari *Political Stability* terhadap Pertumbuhan Ekonomi tidak signifikan. Stabilitas politik merupakan keteguhan pemerintah dan/atau rezim mungkin terdistorsi oleh berbagai peristiwa, seperti kudeta dan seringnya pemerintahan perubahan pemerintahan atau kabinet, dan, pada gilirannya, sering menyebabkan perubahan dalam kebijakan ekonomi. Ketidakstabilan politik menimbulkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan ekonomi mengenai hal tersebut faktor-faktor seperti investasi, produksi atau pasokan tenaga kerja dan berdampak negatif terhadap perekonomian pertumbuhan (Bayar, 2016).

E. Wibowo (2013) juga mengemukakan bahwa Stabilitas politik tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mengindikasikan nilai *political stability index* di negara-negara ASEAN tidak akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi adalah dua aspek yang berbeda, dan kemajuan dalam mencapai salah satu aspek tidak selalu berdampak pada kemajuan pencapaian aspek yang lain.

Government Effectiveness

Kemudian, untuk variabel *Government Effectiveness* dengan nilai 0.026439 dan signifikansinya 0.0029. Dapat dikatakan variabel *Government Effectiveness* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Annur (2019) dampak positif dari *Government Effectiveness* terhadap Pertumbuhan Ekonomi merupakan bentuk efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kebijakan yang ditujukan dengan benar mengurangi potensi korupsi dan *government* berkontribusi terhadap pemberian layanan publik.

Regulatory Quality

Regulatory Quality dengan nilai koefisien 0.003816 dan tingkat signifikansi 0.5241 yang berarti bahwa *Regulatory Quality* memiliki dampak positif, namun tidak signifikan pada Pertumbuhan Ekonomi. Sesuai dengan temuan Annur (2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *regulatory quality* tidak berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh sebaik apapun kemampuan pemerintah dalam memberikan regulasi dan implementasi terhadap kebijakan dan *public regulations* (peraturan publik), serta efektifitas pemerintah dalam perkembangan sektor swasta tidak mempengaruhi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Rule of Law

Nilai *Rule of Law* sebesar 0.024975 dan tingkat signifikansi sebesar 0.0202, disimpulkan bahwa *Rule of Law* memiliki dampak positif signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Menurut E. Wibowo (2013) menemukan hubungan positif *Rule of Law* terhadap pertumbuhan ekonomi mengindikasikan bahwa meningkatnya tingkat kepatuhan dan penegakan hukum dalam mematuhi peraturan akan berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Prinsip *Rule of Law* merupakan sebuah lembaga krusial terkait dengan pertumbuhan ekonomi karena secara langsung berkaitan dengan jaminan terhadap keamanan pribadi, hak milik, penegakan dan pengendalian kontrak yang bebas dari korupsi.

P. S. Ramadhan (2021) dalam penelitiannya mengungkapkan kemampuan *Rule of Law* berfungsi untuk membatasi wewenang pemerintah, mencegah terjadinya korupsi dalam pemerintahan. Dengan adanya aturan hukum yang diikuti oleh pemerintah sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif, serta bertanggung jawab terhadap kewenangannya. Lembaga penegak hukum memastikan bahwa

pemerintahan beroperasi secara transparan dan berfungsi dengan baik, yang diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan pada kemajuan ekonomi dan memacu pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.

Penting bagi pemerintah untuk memastikan keberlakuan hukum dan ketertiban, keberlanjutan independensi peradilan, serta pengendalian terhadap korupsi guna menjaga supremasi hukum dan mencegah korupsi yang mungkin timbul akibat kegagalan pemerintahan. Negara perlu mempertahankan supremasi hukum dengan baik, dan perbedaan kekuatan supremasi hukum di negara maju umumnya lebih mencolok daripada di negara berkembang. Ketika terjadi gangguan pada penerapan hukum di negara berkembang, risiko korupsi, pengambilalihan, dan kekerasan cenderung meningkat (Samarasinghe, 2018).

Control of Corruption

Variabel terakhir yaitu *Control of Corruption* dengan nilai koefisien -0.002316 dan tingkat signifikansinya 0.7914 yang berarti *Control of Corruption* mempunyai pengaruh yang negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Asbarini et al. (2021) dalam penelitiannya juga mengemukakan bahwa *Control of Corruption* tidak memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun upaya untuk mengendalikan tingkat korupsi di berbagai negara ASEAN dilakukan, ini tidak akan memengaruhi secara signifikan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Hal ini juga menunjukkan bahwa ketika *Control of Corruption* di suatu negara lemah, maka akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Huntington (2015), berpendapat bahwa korupsi memiliki peran sebagai dorongan finansial yang memungkinkan pengusaha menghindari keterlambatan, sehingga membuat proses transaksi lebih efisien dibandingkan dengan melibatkan sektor publik. Korupsi yang bersifat "speed money" berpotensi memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Suap dalam konteks ini dapat membantu pengusaha menghindari penundaan dalam birokrasi, yang pada gilirannya mempercepat pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, kontrol terhadap korupsi dapat memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Irawanti (2015) berpendapat bahwa korupsi memiliki peran sebagai dorongan finansial yang memungkinkan pengusaha menghindari keterlambatan, sehingga membuat proses transaksi lebih efisien dibandingkan dengan melibatkan sektor publik. Korupsi bersifat "speed money" berpotensi memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Suap dalam konteks ini dapat membantu pengusaha menghindari penundaan dalam birokrasi, yang pada gilirannya mempercepat pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, kontrol terhadap korupsi dapat memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara (P. S. Ramadhan, 2021).

Menurut Samarasinghe (2018), terdapat suatu kelompok yang meyakini bahwa dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat negatif karena berkontribusi pada peningkatan biaya transaksi dan biaya produksi. Yang lebih penting, korupsi akan mengurangi kepercayaan konsumen, kepercayaan investor, dan kepercayaan masyarakat secara umum. Pada akhirnya, tingkat korupsi yang lebih tinggi dihubungkan dengan penurunan kualitas institusi dalam masyarakat tertentu secara menyeluruh.

Uji Koefisien Determinan (Uji R²)

Pengujian ini digunakan untuk mengukur tingkat kontribusi variabel independen yang digunakan terhadap variabel dependen. Berdasarkan pada hasil regresi dengan menggunakan *Random Effect Model* dengan nilai sebesar 0.174449. Ini menunjukkan variabel independen yang digunakan yaitu *Voice and Accountability*, *Political Stability*, *Government Effectiveness*, *Regulatory Quality*, *Rule of Law*, dan *Control of Corruption*

memberikan kontribusi sebesar 17%, sementara 83% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel yang diuji oleh peneliti.

E. PENUTUP

Setelah mengkaji dan membahas temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel *Voice and Accountability*, *Political Stability*, *Regulatory Quality*, dan *Control of Corruption* tidak memiliki dampak signifikan pada perkembangan ekonomi. Hal ini menjelaskan sebesar apapun masyarakat terlibat dalam proses pemilihan partai dan pemimpin, serta kebebasan berbicara, berserikat, dan menentukan kebijakan publik, tidak akan memiliki pengaruh terhadap perkembangan ekonomi. Hal ini juga menunjukkan bahwa sebesar apapun indeks stabilitas politik di negara-negara ASEAN serta kemampuan pemerintah dalam menggagas dan melaksanakan kebijakan serta regulasi yang mendukung dan mendorong pertumbuhan sektor swasta belum bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung.

Disisi lain, variabel *Government Effectiveness* dan *Rule of Law* berdampak positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebab, semakin tinggi pelayanan publik baik dari tekanan politik, implementasi kebijakan dan kualitas perumusan, serta kredibilitas komitmen pemerintah, maka semakin tinggi juga pertumbuhan ekonomi kedepannya. Ini menunjukkan bahwa jika masyarakat mengikuti aturan dan penegakkan hukum, maka juga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara.

Hasil kesimpulan ini memberikan masukan terhadap pemerintah agar mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dan mampu menaati aturan hukum yang berlaku agar pemerintah dapat menjalankan tugas dan fungsi nya secara efektif, serta bertanggung jawab terhadap kewenangannya agar dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga pertumbuhan ekonomi di negara nya semakin baik dan terus meningkat. Para pelaku ekonomi maupun seluruh lapisan masyarakat hendaknya dapat meningkatkan kesadaran akan tingkat kepatuhan dan penegakan hukum dalam mematuhi peraturan agar dapat menciptakan *Good Governance* yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat melengkapi keterbatasan dari penelitian ini agar dikembangkan lebih luas terhadap variabel, objek, dan periode penelitian sehingga perubahan yang terjadi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara terkait dapat terlihat. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang dapat mengukur pertumbuhan ekonomi seperti *Forex Direck Invesment* (FDI), Indeks pembangunan manusia (IPM)/ *Human Development Index* (HDI), Tingkat pendidikan, Bauran kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan variabel-variabel lain.

REFERENSI

- Alam, M. R., Kitenge, E., & Bedane, B. (2017). Government effectiveness and economic growth. *Economics Bulletin*, 37(1), 222–227.
- Aminu, A. W., Mohammed, B. S., Hayewa, S., & Shuaibu, H. (2021). Good Governance and Economic Growth in South European Countries. *Review of European Studies*, 13(2), 26. <https://doi.org/10.5539/res.v13n2p26>
- Annur, M. A. P. (2019). Pengaruh Good Governance Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 5 Negara di ASEAN Tahun 2007-2017. In *Carbohydrate Polymers* (Vol. 6, Issue 1).
- Asbarini, N. F. E., Isnaini, L., & Wibowo, M. G. (2021). Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di ASEAN. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Volume*, 12(1), 82–93.
- Astutiningsih, S. E., & Sari, C. M. (2017). Empowerment Of Agroindustry Groups In An

- Effort To Accelerate East Java's Economic Growth. *JIET (Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan)*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.20473/jiet.v2i1.5500>
- Bayar, Y. (2016). Public Governance And Economic Growth In The Transitional Economies Of The European Union. *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, 48(E), 5–18.
- Budiyanti, E. (2017). Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Kajian*, 22(1).
- Case, K. E., & Fair, R. C. (2002). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Mikro*. Prehalindo.
- Irawanti, I. (2015). *Pengaruh Good Local Governance, Net Ekspor, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja dan Pendapatan Daerah Terhadap Korupsi (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia)*. Universitas Diponegoro.
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2009). Governance matters VII: Aggregate and individual governance indicators 1996-2007. *Non-State Actors as Standard Setters*, 146–188. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511635519.007>
- Maharani, K., & Isnawati, S. (2014). Kajian Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan Keterbukaan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 21(1), 62–72.
- Mira, R., & Hammadache, A. (2017a). Good Governance and Economic Growth: A Contribution to the Institutional Debate about State Failure in Middle East and North Africa. *Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies*, 11(3), 107–120. <https://doi.org/10.1080/25765949.2017.12023313>
- Mira, R., & Hammadache, A. (2017b). Relationship Between Good Governance and Economic Growth. A Contribution to the Institutional Debate About State Failure in Developing Countries. *Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies*, 11(3), 107–120.
- Mukiwihando, R. (2020). Pengaruh tata kelola terhadap pencapaian tujuan desentralisasi fiskal. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2(1), 114–123.
- N. Gregory Mankiw. (2010). *Macroeconomics*, 7th edn. Worth Publisher.
- Nowbutsing, B. M. (2014). The Impact of Openness on Economic Growth: Case of Indian Ocean Rim Countries. *Journal of Economic and Development Studies*, 2(2).
- Pustikom Universitas Bung Hatta. (2018). *Bentuk Globalisasi Ekonomi Dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia*. Universitas Bung Hatta. <https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/id/artikel/2246-bentuk-globalisasi-ekonomi-dan-pengaruhnya-terhadap-indonesia>
- Putri, R. H. (2022). Pengaruh Kebijakan Subsidi, Foreign Direct Investment (FDI) Dan Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Negara – Negara Di Asean). *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 3(1), 129–144. <https://doi.org/10.24042/revenue.v3i1.11621>
- Ramadhan, M. (2019). Assessing Of The Impact Of Good Governance And Institutions On Economic Growth In Indonesia. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(11), 2594–2598.
- Ramadhan, P. S. (2021). *Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara ASEAN-6*. Universitas Islam Indonesia.
- Samarasinghe, T. (2018). Impact of Governance on Economic Growth. *MPRA (Munich Personal RePEc Archive)*, 89834, 1–50. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/89834/>
- Sari, A. C. P., & Kaluge, D. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi ASEAN Member Countries Pada Tahun 2011-2016. *JIBEKA*, 11(1), 24–29.
- Sukirno, S. (2015). *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah Dan Dasar Kebijakan*. Edisi kedua. Kencana.
- Suryana. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*. Salemba Empat.

- Syaifullah, A., & Malik, N. (2017). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan di ASEAN-4 (Studi Pada 4 Negara ASEAN). *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 107–119.
- Tambunan, T. (2001). *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*. Ghalia Indonesia.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi, edisi kesembilan*. Erlangga.
- Wibowo, E. (2013). Analisis Pengaruh Kualitas Pemerintahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN. *Jurnal Ilmiah FEB Universitas Brawijaya*, 1–14.
- Wibowo, M. G. (2020). *Peran Tata Kelola Pemerintahan (Governance) Serta Bauran Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Pertumbuhan Ekonomi: Studi Di Negara-Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI)*. UIN Sunan Kalijaga.
- Widianatasari, A., & Purwanti, E. Y. (2021). Pengaruh Kualitas Institusi, Pengeluaran Pemerintah, dan Foreign Direct Investment terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Ecoplan*, 4(2), 86–98. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v4i2.286>
- Wiliyanti, R., Sari, R. N., & Darlis, E. (2014). Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Peran Auditor Internal Terhadap Tingkat Kecurangan. *Jurnal Online Mahasiswa*, 1(1), 1–15.
- World Bank. (1992). *Governance and Development*. World Bank.
- Zaroni, A. N. (2015). Globalisasi Ekonomi dan Implikasinya Bagi Negara-Negara Berkembang : Telaah Pendekatan Ekonomi Islam. *AL-TIJARY*, 1(1).